

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanaman modal atau investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Pada posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak atau lesunya perekonomian. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian setiap negara senantiasa menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing (Dumairy, 1997).

Usaha untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Disamping menggali sumber pembiayaan asli daerah, pemerintah daerah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri salah satunya adalah Penanaman Modal Asing Langsung (Foreign Direct Investment) (Sarwedi 2002).

Penanaman modal asing (PMA) sebagai salah satu komponen aliran modal yang masuk ke suatu daerah dianggap sebagai aliran modal yang relatif stabil dan mempunyai resiko yang kecil dibandingkan dengan aliran modal lainnya, misalnya investasi portofolio maupun utang luar negeri. Penanaman modal asing

lebih banyak mempunyai kelebihan diantaranya sifatnya permanen (jangka panjang), banyak memberikan andil dalam alih teknologi, alih ketrampilan manajemen dan membuka lapangan kerja baru (Yuni, 2011).

Perekonomian Indonesia mengalami perjalanan yang fluktuasi, minyak dan gas alam yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan, harganya di pasar internasional semakin tidak stabil. Keadaan ini ditambah dengan krisis ekonomi yang melanda semenjak pertengahan tahun 1997 yang tidak hanya mencakup seluruh sendi kehidupan ekonomi tetapi juga melanda pada aspek kehidupan lainnya. Hal tersebut menyebabkan kemampuan keuangan pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan semakin rendah. Turunnya kemampuan keuangan pemerintah pusat ini semakin didramatisir oleh kenyataan bahwa perekonomian Indonesia semakin membutuhkan dana yang besar untuk penyediaan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan investasi yang semakin meningkat, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Perubahan lain yang bersifat eksternal yang memiliki implikasi paling radikal pada semua aspek kehidupan adalah globalisasi dan regionalisasi yang akan terus berkembang karena revolusi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, integrasi pasar uang dan modal. Kesemuanya ini membutuhkan suatu strategi dalam kebijakan ekonomi makro dalam menghadapi adanya persaingan di pasar internasional dan yang paling penting adalah dalam memenuhi tujuan masyarakat yang adil dan makmur baik materil maupun spirituil.

Seperti yang diketahui sebagai unsur permintaan agregat, kenaikan laju investasi secara umum memiliki pengaruh dalam menaikkan output suatu

negara. Sebaliknya penurunan laju investasi akan berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap saat pemerintah berusaha secara intensif menarik investor untuk menanamkan modalnya kepada negara-negara yang sedang berkembang khususnya Indonesia. Investasi di Indonesia sampai pada saat awal tahun 2000, mengalami pertumbuhan yang menggembirakan bahkan melebihi pertumbuhan produksi nasional. Hal ini terlihat pada tingkat perkembangan rata-rata kontribusi investasi selama Pembangunan Jangka Panjang I (PJP) terhadap produk nasional, dari semula 18% menjadi 30,5%. Hal ini berarti pertanda kenaikan kapasitas pada produksi nasional. Seiring dengan hal tersebut laju pertumbuhan Indonesia selama PJP I juga meningkat yaitu menjadi rata-rata 6,82%, dan ini menurut Bank Dunia merupakan laju pertumbuhan yang terbaik diantara negara-negara sedang berkembang (Dumairy:1999).

Dalam perkembangannya pemerintah Indonesia terus memperbaharui berbagai peraturan untuk lebih mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan daerah serta mempercepat peningkatan penanaman modal yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penetapan undang-undang tersebut juga ditujuakn untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai peraturan pelaksanaan penanaman modal, di antaranya: Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Tentang Pedoman

Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Daerah-Daerah Tertentu, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanamn Modal, dan lain sebagainya.

Dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan 2013 penanaman modal asing di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pasang surut dikarenakan berbagai kondisi perekonomian antara lain krisis ekonomi pada tahun 1998 yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh D. I. Yogyakarta saja melainkan juga dirasakan oleh daerah-daerah lain di Indoneisa. Dengan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Yogyakarta berusaha untuk menaikkan jumlah investor asing untuk menanamkan modal di Yogyakarta. Keuntungan berinvestasi di Yogyakarta adalah: tanah murah, tenga kerja relatif murah (UMP Reasonable), pekerja relatif “mau mendengar” dan mudah untuk berdiskusi, (*turn over*) rendah, (*living cost*) reatif murah, adanya fasilitas bandara internasional dan pelabuhan untuk ekspor atau impor relatif dekat (Semarang dan Surabaya) karena Yogyakarta sebagai daerah yang terletak dibagian tengah pulau Jawa bagian Selatan, menjadikan daerah ini

sebagai jalur alternatif utama menuju Sumatera, Jawa, Bali, baik melalui jalur darat, jalur laut, jalur udara, serta sarana pos dan telekomunikasi serta banyaknya tempat-tempat wisata yang berada di setiap Kabupaten yang ada D.I. Yogyakarta. Memberikan kesempatan untuk dijadikan sebagai keunggulan komparatif bagi Yogyakarta untuk memperluas kegiatan pemasaran dan pergudangan baik barang ataupun jasa. Serta di dukung dengan ciri masyarakat Jawa yang dikenal sopan serta dapat menjalin hubungan baik, dan adanya dukungan dari pemerintah daerah Yogyakarta.

Pembangunan ekonomi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta lebih ditujukan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata, dan berkelanjutan, serta mampu berdaya saing melalui arah pembangunan dan pengembangan investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, pemenuhan sarana prasarana ekonomi dan menjamin kepastian berusaha. Pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta dapat dilihat dari nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), selama kurun waktu 2009-2013, rata-rata pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,04% per tahun. Kondisi tahun 2013, laju pertumbuhan ekonomi DIY mencapai 5,40% yang berarti bahwa kinerja perekonomian DIY mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 5,32%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 merupakan angka tertinggi selama sepuluh tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi DIY jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa relatif masih rendah, bahkan lebih rendah dari pada rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena wilayah DIY relatif kecil sehingga sumber daya alam yang

dimiliki terbatas dan skala pengembangan industri pengolahan tidak sebesar provinsi lain di Jawa (RKPD DIY, 2015).

Perekonomian DIY lebih mengandalkan sektor tersier terkait dengan perkembangan sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan peranan sektor pertanian yang merupakan sektor primer cenderung menurun. Penurunan kontribusi sektor pertanian sebagai akibat konversi lahan pertanian dan kenaikan harga biaya produksi pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian DIY mengalami pergeseran dari perekonomian agraris menuju niaga jasa. Industrialisasi yang biasanya terjadi pada beberapa wilayah yang semula berbasis pertanian tidak sepenuhnya terjadi di DIY.

Selama kurun waktu 2009-2013, nilai PDRB atas karga konstan 2000 mengalami peningkatan, pada tahun 2009 nilai PDRB rill tercatat sebesar 20,06 triliun rupiah kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 24,57 triliun rupiah sehingga selama periode tersebut secara rill PDRB DIY naik sebesar 4,51 triliun rupiah atau 22,44%. Peningkatan nilai PDRB terjadi di semua sektor.

Tabel 1.1
Nilai PDRB DIY Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha
(Juta Rupiah), 2009-2013

Lapangan Usaha	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	3.642.696	3.632.681	3.557.865	3.706.923	3.730.297
Pertamb.&Penggalian	138.748	139.967	156.711	1.59.808	167.669
Industri Pengolahan	2.610.760	2.793.580	2.983.167	2.915.722	3.142.836
Listrik, Gas & Air Bersih	185.599	193.027	201.243	215.597	229.640
Konstruksi	1.923.720	2.040.306	2.187.805	2.318.448	2.459.173
Perdagangan, Hotel & Restoran	4.162.116	4.383.851	4.611.402	4.920.045	5.225.056
Pengangkutan & Komunikasi	2.128.594	2.250.664	2.430.696	2.581.620	2.744.146
Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan	1.903.411	2.024.368	2.185.221	2.402.718	2.552.445
Jasa-jasa	3.368.614	3.585.598	3.817.665	4.008.337	4.316.241
PDRB	20.064.257	21.044.042	22.131.774	23.209.218	24.567.476

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DIY, 2014

Tabel 1.1 menunjukkan kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB yang dapat menggambarkan seberapa besar peranan suatu sektor dalam menunjang perekonomian. Selama periode 2009-2013 struktur perekonomian DIY didominasi oleh empat sektor, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor jasa-jasa, sektor pertanian, serta sektor industri pengolahan. Kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta sektor industri pengolahan cenderung meningkat pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Sedangkan peranan sektor lainnya mengalami penurunan pada tahun 2013. Sektor jasa memberikan kontribusi terbesar pada PDRB DIY dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun terakhir sebesar 20,02%. Setelah itu diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran

(19,84%), sektor pertanian (14,71%), serta sektor industri pengolahan dengan kontribusi 13,77%

Disisi lain Realisasi penanaman modal asing di DIY mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Data investasi tercatat selama lima tahun terakhir, pada tahun 2009 nilai realisasi penanaman modal asing sebesar Rp 2.508.131.163.857 dengan jumlah 86 perusahaan, tahun 2010 realisasi yang tercapai Rp 2.696.046.957.447 dengan jumlah 92 perusahaan naik dari tahun sebelumnya, meskipun pada saat itu Yogyakarta dilanda bencana alam meletusnya Gunung Merapi, namun Pemerintah Yogyakarta cukup tanggap dengan bencana tersebut dan dalam penanganannya paska bencana mendapat bantuan dari semua pihak, menjadikan keadaan perekonomian cepat kembali meskipun belum terlalu meningkat. Pada tahun 2011 nilai PMA mengalami kenaikan menjadi Rp 4.110.436.324.224 naik menjadi 104 perusahaan, pada tahun 2012 kembali mengalami kenaikan realisasi PMA sebesar Rp 4.250.121.535.829 dengan 111 perusahaan dan pada tahun 2013 naik menjadi 5.203.115.642.883 dengan jumlah perusahaan 115.

Tabel 1.2
Realisasi Penanaman Modal Asing menurut Sektor di Provinsi
D.I.Yogyakarta Tahun 2009-2013

No	Tahun	Nilai PMA	Jumlah Perusahaan
1	2009	2.508.131.163.857	86
2	2010	2.696.046.957.447	92
3	2011	4.110.436.324.224	104
4	2012	4.250.121.535.829	111
5	2013	5.203.115.642.883	115

Sumber: BKPM, DIY 2014

Meskipun secara keseluruhan investasi di DIY mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari komposisi presentasi di Kabupaten/Kota masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Investasi di DIY masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Pencapaian nilai tersebut merupakan suatu keberhasilan bagi Provinsi DIY dalam meningkatkan kebutuhan investasinya, diakui atau tidak masuknya modal asing berkaitan erat dengan perizinan yang diberikan Pemerintah DIY. Salah satu diantaranya adalah menerapkan sistem pelayanan (*one-stop-shop*), guna memangkas rantai pungutan birokrasi sehingga investor lebih cepat untuk menyelesaikan izin-izin usaha. Tujuannya adalah menyederhanakan dan mengkonsolidasikan sejumlah langkah dan tempat seorang investor mendapatkan izin usahanya. Yogyakarta telah memberikan perhatian khusus terhadap kelancaran proses perizinan melalui pelayanan (Satu Atap) dengan mendirikan Gerai Investasi, tujuannya untuk melayani secara terpadu pemberian izin penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Yogyakarta.

Dilihat dari tinjauan ekonomis, penanaman modal asing di DIY tidak hanya dipengaruhi oleh PDRB, tingkat suku bunga, dan inflasi saja melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor non ekonomis, misalnya situasi pemerintahan baik politik, kebijakan pemerintah di bidang perizinan, pengelolaan lingkungan, informasi peluang investasi, serta sikap sosial masyarakat daerah dan sebagainya.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas dan beberapa fenomena yang terjadi tersebut, maka mendorong peneliti untuk mengamati faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penanaman modal asing di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL ASING DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, Periode 2006-2013)”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dinilai penting agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan. Pembahasan secara spesifik juga membuat bahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah. Adapun pembatasan tersebut diantaranya:

1. Objek yang diteliti adalah Penanaman Modal Asing di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perKabupaten/Kota.
2. Beberapa variabel yang diteliti adalah penanaman modal asing sebagai variabel dependen, sedangkan Suku Bunga Kredit, (PDRB) Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Inflasi sebagai variabel independen.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah produk domestik regional bruto mempengaruhi Penanaman Modal Asing (PMA) di provinsi D.I.Yogyakarta PerKabupaten/Kota pada periode tahun 2006-2013?
2. Apakah Suku Bunga Kredit mempengaruhi Penanaman Modal Asing (PMA) di provinsi D.I Yogyakarta PerKabupaten/Kota pada periode tahun 2006–2013?
3. Apakah inflasi mempengaruhi Penanaman Modal Asing (PMA) di provinsi D.I Yogyakarta PerKabupaten/Kota pada periode tahun 2006–2013?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing (PMA) khususnya di kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menguji pengaruh Suku Bunga Kredit Investasi (KI) terhadap penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten/Kota Dearah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menguji pengaruh Inflasi terhadap penanaman modal asing (PMA) di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, baik bersifat akademis maupun praktis, yaitu:

1. Bagi penulis penelitian ini digunakan untuk mengimplementasikan atau menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di bangku perkuliahan.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian serupa maupun lanjutan di bidang Investasi khususnya Penanaman Modal Asing. Dan memberikan informasi terhadap pemerintah daerah baik kabupaten ataupun kota dalam pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, khususnya Penanaman Modal Asing.
3. Bagi Pemerintah memberikan gambaran mengenai faktor yang dapat mempengaruhi penanaman modal asing baik dalam lingkup daerah maupun nasional.